



POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Irman Puansah¹⁾, Darman Syah Pulungan²⁾, Ali Sahbana³⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Koresponding : Irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Politik identitas merupakan salah satu strategi calon kepala desa dalam memperoleh suara dalam kontestasi pemilihan umum di desa. Politik identitas menjadi salah satu alat perjuangan bagi sekelompok orang yang ingin menang dalam pemilihan kepala desa. Meski sesungguhnya politik identitas dapat merusak nilai demokrasi di Indonesia namun politik identitas dalam pemilihan kepala desa masih sering terjadi. Tentunya jika politik identitas tersebut terus terjadi pada pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan terjadi kelompok dominan yang akan menekan kelompok minoritas. Politik identitas juga dapat membuat masyarakat terpecah belah karena perbedaan identitas yang selalu ditonjolkan. Berdasarkan hal tersebutlah tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya politik identitas pada pemilihan kepala desa, apa saja bentuk-bentuk dari politik identitas yang terjadi di desa, dan apa dampak dari politik identitas di desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, pengumpulan informasi dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas merupakan salah satu alat perjuangan dan alat untuk mendulang suara sehingga sulit untuk dihindarkan. Bentuk-bentuk politik identitas diantaranya identitas agama, etnis, budaya marga, gender dan perbedaan teritorial. Politik identitas memiliki dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi.

Kata kunci: Identitas, Pemilihan Kepala Desa, Politik.

Abstract

Identity politics is one of the strategies of village head candidates in gaining votes in general election contests in villages. Identity politics has become a tool of struggle for a group of people who want to win in the village head election. Even though identity politics can actually damage democratic values in Indonesia, identity politics in village head elections still often occurs. Of course, if identity politics continues to occur in village head elections, it is feared that dominant groups will suppress minority groups. Identity politics can also divide society because different identities are always emphasized. Based on this, this paper aims to find out what identity politics really is in village head elections, what forms of identity politics occur in villages, and what the impact of identity politics is in villages. The method used in this paper is literature study, collecting information by understanding and studying theories from various literature related to the research. The research results show that identity politics is a tool of struggle and a tool for gaining votes, so it is difficult to avoid. Forms of identity politics include religious identity, ethnicity, clan culture, gender and territorial differences. Identity politics has a negative impact on the sustainability of democracy.

Keywords: Identity, Village Head Election, Politics.



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal sebagai "Pilkades", adalah proses kedaulatan rakyat yang melibatkan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat dari tahap pencalonan hingga pelantikan calon terpilih. Masyarakat secara bebas dapat menentukan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpinnya.

Selain itu pilkades, juga dikenal sebagai pemilihan kepala desa, adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung di sebuah desa oleh warganya yang memilih pemimpinnya. Ini adalah pemilihan yang dilakukan di negara dengan sistem demokrasi yang memungkinkan warganya untuk menikmati kebebasan berbicara, berpendapat, dan memilih sesuai dengan undang-undang. (surya dalam Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J.,(2023).

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia sering sekali diwarnai dengan politik identitas. Peraktek politik identitas dilakukan oleh sebahagian orang, para calon, tim sukses dan siapapun yang terlibat dalam pemenangan yang berkontestasi dalam politik baik Tingkat nasional maupun Tingkat lokal, termasuk pada pemerintahan desa karena dapat menjanjikan peluang menang yang cukup besar bagi para calon tersebut. Maka tidak heran politik identitas masih sering terjadi di Indonesia khususnya pada Pemerintah Desa. Politik identitas yang terjadi selama ini terjadi dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan antar Masyarakat, apa bila politik identitas tersebut terus menerus terjadi. Kelompok-kelompok yang dominan secara identitas dikhawatirkan dapat mendominasi kelompok-kelompok minoritas,

Berbicara tentang politik identitas, ada banyak jenis politik identitas yang berasal dari agama, etnisitas, gender, perbedaan teritorial, dan marga. Namun, yang paling sering dilihat dan dihadapi adalah agama dan etnisitas. Sebenarnya, politik identitas tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran politik. Efek negatifnya adalah memecah belah masyarakat, menyebabkan konflik, dan akhirnya menyebabkan kekacauan atau perbedaan pendapat. Karena itu, politik identitas selalu dipandang negatif oleh masyarakat. Selain itu, ada kemungkinan politik identitas akan terjadi, tetapi hanya akan terjadi ketika ada kemungkinan (Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J.,(2023).

Ketika ketidakadilan muncul, politik identitas adalah alat perjuangan yang digunakan suatu kelompok untuk memperjuangkan tujuan kelompok tersebut. Ini biasanya juga muncul sebagai hasil dari konflik antara kelompok. Mereka percaya bahwa ada kesamaan karakteristik atau etnis dan kesukaan dalam kelompok tersebut. (Alfaqi dalam Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J.,(2023).

Menurut beberapa penelitian, politik identitas di Indonesia dianggap sebagai praktik politik yang tidak baik karena upaya untuk menerima atau menolak individu atau kelompok sosial tertentu berdasarkan identitas mereka. Ini tercermin dari ketidakinginan masyarakat untuk memilih pemimpin atau berintegrasi dengan kelompok lain yang memiliki identitas yang berbeda, atau konflik sosial politik lainnya yang didasarkan pada identitas. (Mali dalam Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J.,(2023).

Politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah strategi politik yang berfokus kepada sebuah pembedaan yang memanfaatkan sebuah ikatan primordial. Politik identitas juga bisa dikatakan sebagai alat untuk berpolitik di dalam kelompok baik etnis, agama, suku, atau bahkan yang lain yang memiliki sebuah tujuan tertentu, dan bisa untuk alat yang sebagai penunjuk sebuah jati diri dari kelompok tersebut. (Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021).

Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan politik lokal yang tidak berkaitan dengan partai politik tetapi mempunyai muatan politik yang utuh, seperti strategi pemilihan calon kepala desa dengan menggunakan politik identitas lokal dan dinasti karena kekuatan keluarga dan genetika untuk mempengaruhi pemilih. (Akmaluddin, A., & Ibrahim, H. (2022).

Demikian pula dalam konteks Pemilihan Kepala Desa di berbagai desa di Indonesia, peran politik identitas nasional dalam kontestasi demokrasi di tingkat nasional dan daerah merupakan landasan kekuatan bersama untuk mencapai tujuan mengidentifikasi individu untuk menentukan pilihannya, perilaku mengalami transpormasi.

Tidak bisa di pungkiri bahwa politik identitas utamanya di tingkat desa, terkhusus pada pemilihan kepala desa hampir tidak bisa ditinggalkan, selain karena banyaknya identitas yang bisa dijual oleh para calon kandidat juga politik identitas memberikan peluang menang yang cukup besar. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan, meskipun politik identitas dianggap sebagai alat perjuangan oleh kelompok identitas tertentu. Namun jika hal tersebut terjadi secara terus menerus dikhawatirkan justru akan merusak demokrasi, memunculkan kelompok yang dominan dan sebaliknya akan terdapat kelompok minoritas yang bisa saja akan tertindas.

Berdasarkan hal tersebutlah penulis merasa tertarik untuk menulis artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya politik identitas pada pemilihan kepala desa, apa saja bentuk-bentuk dari politik identitas yang terjadi di desa, dan apa dampak dari politik identitas di desa.

METODE

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library investigate) yaitu metode dengan pengumpulan information dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan information tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Berdasarkan rujukan tersebut di atas dapat diketahui bahwa studi pustaka merupakan metode dengan cara mengumpulkan informasi terkait penelitian yang akan diteliti dengan cara memahami dan mempelajari dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah dilakukan, kemudian bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi yang sudah ada dianalisis secara kritis serta mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai politik identitas maka sebelumnya mari melihat beberapa pendekatan terbentuknya identitas. Menurut Widayanti Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: a. Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. b. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. c. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, dalam Kalemang, E. 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa terbentuknya identitas paling tidak melalui pendekatan:

1. Primordialisme
 - a. Identitas diperoleh secara alamiah dan turun temurun.
 - b. Proses pembentukan identitas terkait erat dengan faktor-faktor keturunan, seperti keluarga, suku, atau etnis.
 - c. Individu dianggap mewarisi identitas mereka dari generasi sebelumnya, dan identitas tersebut dianggap sebagai sesuatu yang melekat secara alami.
2. Konstruktivisme
 - a. Identitas dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks.
 - b. Pembentukan identitas terjadi melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
 - c. Identitas dapat berkembang melalui interaksi sosial, pengaruh budaya, dan proses komunikasi yang melibatkan individu dalam lingkungan mereka.
3. Instrumentalisme
 - a. Identitas dianggap sebagai sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit.
 - b. Pendekatan ini menekankan aspek kekuasaan dalam pembentukan identitas.
 - c. Identitas mungkin digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, terutama oleh kelompok atau elit yang memiliki kepentingan tertentu dalam masyarakat.

Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan pandangan berbeda tentang bagaimana identitas individu dan kelompok terbentuk. Primordialisme menyoroti faktor-faktor keturunan dan warisan, konstruktivisme menekankan peran proses sosial dan budaya, sedangkan instrumentalisme menyoroti dimensi kekuasaan dan manipulasi identitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam sosiologi, konsep identitas merupakan struktur keanggotaan individu dalam kelompok, seperti ciri, kategori dan peranan sosial. Seseorang yang memiliki identitas yang sama mempunyai persamaan kebudayaan seperti agama, bahasa, organisasi politik dan sosial dimana tumbuh perasaan dan kesadaran esprit de corps (kekitaan). (Lestari, D. (2019).

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Identitas dalam sosiologi dipahami sebagai struktur keanggotaan individu dalam kelompok, yang mencakup ciri, kategori, dan peranan sosial. Individu yang memiliki identitas yang sama cenderung memiliki persamaan kebudayaan, seperti agama, bahasa, organisasi politik, dan sosial. Identitas ini dapat menciptakan perasaan dan kesadaran esprit de corps atau kekitaan.

Menurut dan Abrams Definisi identitas adalah konsep masyarakat tentang siapa dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut mereka masyarakat terstruktur secara hirarkis ke dalam kategori-kategori sosial dalam penggolongan individu menurut ras, negara, kelas sosial, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, agama dan lain sebagainya. Dimana tiap kategori tersebut terdapat suatu kekuatan, status dan martabat yang memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat

dan menentukan kekuatan serta status hubungan antar individu dan antar kelompok. (Hogg dan Abrams, dalam Lestari, D. 2019)

Identitas dalam perspektif Hogg dan Abrams dijelaskan sebagai konsep masyarakat tentang siapa dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Masyarakat dianggap terstruktur secara hirarkis dengan kategori-kategori sosial seperti ras, negara, kelas sosial, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, dan agama. Setiap kategori memiliki kekuatan, status, dan martabat yang membentuk struktur sosial dalam masyarakat, menentukan hubungan antar individu dan antar kelompok.

Konsep identitas menurut Buchari (2014) merupakan tindakan yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain dan dilakukan secara terus menerus dalam interaksi sosial hingga memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut. Kondisi ini akhirnya membuat kemajemukan tidak lagi sebagai ikatan dalam persatuan dan kesatuan. (Buchari, dalam dalam Lestari, D. 2019)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa konsep identitas sebagai tindakan yang membedakan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Proses ini terjadi secara terus menerus dalam interaksi sosial dan dapat menghasilkan opini tertentu yang terkait dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut. Buchari juga menyoroti bahwa dalam konteks ini, kemajemukan tidak selalu menjadi ikatan dalam persatuan dan kesatuan.

Politik identitas menurut Abdilah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa. Identitas bukan hanya persoalan belonging semata, tetapi saat ini identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih. (Rahmawati, D. N. (2024).

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Politik identitas, adalah politik yang memfokuskan kajian dan permasalahannya pada perbedaan yang didasarkan pada asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas, primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Identitas tidak hanya menjadi persoalan belonging semata, melainkan juga bertransformasi sebagai alat politik untuk menarik simpati publik. Dalam konteks demokrasi lokal, banyak kandidat menggunakan identitas etnis untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (grand narrative), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), toleransi dan kebebasan bermain (free play), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (race thinking), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. (Rahmawati, D. N. (2024).

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang memfokuskan perhatiannya pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Ide perbedaan dianggap sebagai suatu janji kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain setelah kegagalan narasi besar. Politik perbedaan menjadi bentuk baru dari politik identitas, dengan mencakup isu-isu seperti rasisme, biofeminisme, dan perselisihan etnis.

Buchari (2014), politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang di pandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya. (Buchari, dalam dalam Lestari, D. 2019)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa politik identitas diartikan sebagai alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemunculannya lebih banyak dipicu oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dianggap sebagai tekanan atau ketidakadilan politik oleh suatu etnis. Etnis yang merasakan ketidakadilan tersebut kemudian bangkit untuk menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam perjuangan politik, dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu.

Kristianus (Buchari, 2014) mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama. Perjuangan politik identitas pada

dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (periferi), baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Kristianus selanjutnya mengutip Lukmantoro yang mengatakan bahwa, politik identitas adalah tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras(suku), etnisitas(asal daerah), atau keagamaan. (Buchari, dalam dalam Lestari, D. 2019)

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa bahwa politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis atau agama. Perjuangan politik identitas ini pada dasarnya merupakan perjuangan kelompok atau individu pinggiran (periferi) dalam segi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Politik identitas diarahkan untuk mengedepankan kepentingan anggota-anggota suatu kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnisitas, atau keagamaan.

Menurut Manuel Castells (2010), dalam *The Power of Identity*, identitas adalah sumber makna diri yang muncul dan diberikan oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri, atau dari sekelompok orang terhadap kelompok mereka sendiri yang dibangun melalui proses individuasi. Identitas terbentuk jika ia diinternalisasi oleh masyarakat di luar dirinya. Castells membagi identitas ke dalam tiga kategori, yaitu *legitimate identity*, *resistance identity* dan *project identity*. Pertama, *legitimate identity*, identitas ini digunakan dalam proses mengenalkan institusi dominan dari suatu masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka terhadap pelaku sosial. Kedua, *resistance identity*, merupakan identitas yang dipertahankan dengan melakukan perlawanan untuk mempertahankan identitas dari stigma pihak yang melakukan dominasi. Fungsi identitas ini adalah sebagai perlawanan dan pertahanan atas perbedaan prinsip dalam institusi masyarakat. Identitas perlawanan dapat dipahami sebagai sebuah identitas yang diperjuangkan dari awal hingga akhir untuk mendapatkan pengakuan atas identitas tersebut dari pihak lain. Ketiga, *project identity*, merupakan tindakan pelaku sosial yang membangun suatu identitas baru yang bertujuan mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan berusaha bertransformasi dari struktur sosial secara menyeluruh. (Manuel Castells dalam dalam Lestari, D. 2019)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa identitas bukan hanya tentang pengenalan diri, tetapi juga melibatkan dinamika kompleks dalam interaksi dengan masyarakat dan institusi. Identitas dapat menjadi alat untuk mendukung dominasi, perlawanan terhadap dominasi, dan bahkan sebagai proyek transformasi yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial secara menyeluruh.

Lebih lanjut lagi, Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (*politics of identity*); identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik. . (Lestari, D. (2019).

Sementara Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai politik yang terfokus pada perbedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*), walaupun memunculkan polapola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, environmentalisme, dan perselisihan etnis. (Lestari, D. (2019).

Dari beberapa tulisan dan defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya politik identitas adalah politik yang memfokuskan pada identitas sebagai pembeda antara beberapa golongan untuk mencapai tujuan, tentunya dalam hal ini adalah tujuan kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Penggunaan politik identitas tentunya tidak lepas dari peraktek politik pragmatisme yang digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi politik dalam pemilihan umum.

Firmansyah menyatakan bahwa untuk meraih kekuasaan politik identitas merupakan kekuatan dalam meraih kekuasaan. (Firmansyah dalam, Akmaluddin, A., & Ibrahim, H. (2022). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa bagi seorang calon kepala desa yang ingin memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa, maka tidak dapat dihindari bahwa politik identitas adalah salah satu senjata yang mesti dimiliki dan dikelola dengan maksimal, karena sesungguhnya politik identitas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam meraih kekuasaan ditingkat lokal, dalam hal ini kepala desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U, dari data lapangan terdapat informasi bahwa politik identitas etnis di Desa Rumpin dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam bidang politik khususnya dalam persaingan perebutan suara pada pemilihan kepala desa Rumpin. Pada penelitian tersebut mampu mengidentifikasi tindakan atau bahkan strategi yang dimiliki setiap calon kepala desa dan kelompok tim suksesnya, antara lain strategi manipulasi dan mobilisasi. Dominasi sosial, dan solidaritas politik. (Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021).

Peran Politik Identitas dalam Meraih Kekuasaan dianggap sebagai kekuatan penting dalam meraih kekuasaan politik. Hal ini menjadi relevan, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa, di mana politik

identitas dianggap sebagai senjata yang harus dimiliki dan dikelola dengan maksimal oleh calon kepala desa untuk memenangkan kontestasi.

Sebagai contoh konkret tentang pengaruh politik identitas etnis dalam bidang politik, terutama dalam persaingan perebutan suara pada pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas etnis mampu memberikan pengaruh yang signifikan, dengan calon kepala desa dan tim suksesnya mengadopsi strategi manipulasi, mobilisasi, dominasi sosial, dan solidaritas politik untuk meraih dukungan.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa politik identitas memiliki dampak yang cukup besar pada tingkat lokal, khususnya dalam dinamika pemilihan kepala desa. Strategi dan tindakan yang berkaitan dengan politik identitas, seperti manipulasi, mobilisasi, dominasi sosial, dan solidaritas politik, menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil pemilihan kepala desa.

Bentuk-Bentuk Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa

Di Indonesia, politik identitas lebih banyak dikaitkan dengan isu etnis, agama, ideologi, dan kepening lokal. Dalam kerangka sejarah, politik identitas di Indonesia lebih bersifat etnik, agama, dan ideologi. (Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021).

Berbicara tentang politik identitas, ada banyak jenis politik identitas yang berasal dari agama, etnisitas, gender, perbedaan teritorial, dan marga. Namun, yang paling sering dilihat dan dihadapi adalah agama dan etnisitas. Sebenarnya, politik identitas tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran politik. Efek negatifnya adalah memecah belah masyarakat, menyebabkan konflik, dan akhirnya menyebabkan kekacauan atau perbedaan pendapat. Karena itu, politik identitas selalu dipandang negatif oleh masyarakat. Selain itu, ada kemungkinan politik identitas akan terjadi, tetapi hanya akan terjadi ketika ada kemungkinan (Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J., (2023).

Selanjutnya, menurut Castells (dalam Munandar, 2013), konstruksi identitas menggunakan bangunan material dari sejarah, geografi, biologi, produksi dan reproduksi institusi, memori kolektif dan fantasi pribadi, aparat kekuasaan, dan ajaran agama. Kemudian, permasalahannya adalah bagaimana seseorang atau kelompok orang mengonstruksikan pembangunan identitas, lalu siapa yang berperan untuk menentukan arah pembangunan identitas tersebut dan apa kegunaannya? Dalam hubungan ini Castells (dalam Munandar, 2013) menyebutkan: a. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*); identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, seperti misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal-hal tersebut. b. Identitas resisten (*resistance identity*); sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi dan stereotipe dari pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya. Hal ini disebutkan sebagai sebuah terminologi ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas. c. Identitas proyek (*project identity*); suatu identitas ketika aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan porsi-porsi baru sekaligus mentransformasikan struktur masyarakat tersebut secara keseluruhan. Misalnya, ketika sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, mengasosiasikan ulang posisi perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan. (Salim, K. (2016).

Dari tulisan tersebut di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk politik identitas antara lain, perbedaan etnis, agama, ideologi, gender, perbedaan teritorial, perbedaan marga dan kepentingan lokal.

Konstruksi identitas Multifaktor Yang antara lain materi, termasuk sejarah, geografi, biologi, produksi, institusi, memori kolektif, fantasi pribadi, aparat kekuasaan, dan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa identitas seseorang atau kelompok tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan.

Dampak Politik Identitas Bagi Pemerintahan Desa

Menurut Siti Kholisoh, politik identitas dapat membawa beberapa dampak antara lain:

- a. Polarisasi sosial. Kelompok identitas Masyarakat terpecah, tantangan mengembalikan agar masyarakat bersatu kembali sebagai bangsa yang berbeda tetap satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika),
- b. Perlakuan tidak setara. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi Bebas warga negara dalam demokrasi. Pesan bahwa kelompok tertentu Adalah warga kelas

rendah (subhuman) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara, dan

- c. Psikologi sosial masyarakat. Masyarakat menjadi mudah tersinggung, gampang terbakar emosi, dan rentan terprovokasi. (Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021).

Politik identitas juga dapat menjadi ancaman dalam hajatan demokrasi yakni:

- a. Politik identitas berpotensi mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat,
- b. Politik identitas menutupi perdebatan program kerja berkualitas, dan
- c. Politik identitas lebih banyak memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Para pendukung merasa identitas mereka adalah kelompok pilihan ciptaan “terbaik” yang akan menyelesaikan masalah di daerahnya. (Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021).

Terdapat beberapa dampak dari politik identitas, hal ini terlihat dari penelitian di Desa Rumpin yang antara lain:

- a. Dampak Positif Dari sebuah perilaku politik lokal yang terdapat di Desa Rumpin lebih ke arah yang dinamis. Para calon kepala desa disibukan dengan bagaimana mereka bisa menerapkan berbagai cara agar bisa mempengaruhi warga desa itu agar memilih kepala desa.
- b. Dampak Negatif Politik Identitas Yang bisa ikut serta dalam pemilihan kepala desa di desa rumpin adalah kejadian yang sudah lama terbangun. Bisa untuk menciptakan sesuatu yang realitas sosial bisa membelah dan bisa membagi masyarakat berdasarkan kriteria. Hal itu sangat fragmatif karena dinamika politik bisa berjalan ke arah yang bisa menimbulkan perpecahan sosial. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan. Kesadaran persamaan dan perbedaan di dalam masyarakat yang diawali dari berbagai faktir politis wujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing etnis. Khususnya di dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok etnis berdiri atas dasar kepentingan sebuah kelompok. Hal itu bisa kemudian memicu konflik karena sikap yang etnosentrisme yang ditunjukkan dengan mengecilkan satu sama lainnya. Konflik yang terjadi itu tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban maka penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung kepada kesadaran antar etnis yang berkonflik (Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021).

Politik identitas tentu memiliki dampak bagi masyarakat Indonesia terkhusus bagi desa. Dimana politik identitas pada pemilihan kepala desa, berdasarkan beberapa tulisan di atas memiliki dampak:

- a. Polarisasi Sosial: Politik identitas dapat menyebabkan polarisasi sosial, memecah belah masyarakat, dan menantang untuk memulihkan persatuan sebagai bangsa. Politik identitas dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat dan tantangan untuk mengembalikan persatuan sebagai bangsa. Masyarakat menjadi terbagi-bagi berdasarkan identitas mereka, mengakibatkan ketegangan dan ketidakharmonisan sosial.
- b. Perlakuan Tidak Setara: Politik identitas dapat mengakibatkan pembatasan kebebasan berbicara, menghambat partisipasi demokrasi, dan menciptakan perlakuan tidak setara terhadap kelompok tertentu. Tentunya politik identitas dapat membawa pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi dalam proses demokrasi.
- c. Psikologi Sosial Masyarakat: Masyarakat dapat menjadi mudah tersinggung, emosional, dan rentan terprovokasi. Politik identitas dapat memengaruhi psikologi sosial masyarakat, membuat mereka mudah tersinggung, emosional, dan rentan terprovokasi. Oleh karenanya Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap konflik dan sulit untuk menjaga keseimbangan emosional dalam berbagai situasi politik.
- d. Politik identitas dapat menciptakan perpecahan dan konflik di masyarakat, terutama jika didasarkan pada faktor etnis dan etnosentrisme.

Terdapat pula dampak positif dari politik identitas yaitu:

- a. identitas dapat menciptakan dinamika dalam perilaku politik lokal, dengan calon kepala desa berusaha mempengaruhi warga untuk mendukung mereka.
- b. Kesadaran Antar etnis: Penyelesaian konflik tergantung pada kesadaran antar etnis dan kesediaan untuk menanggapi perbedaan dengan sikap yang lebih inklusif. Untuk berhasil menyelesaikan konflik, diperlukan dua hal utama: kesadaran yang kuat akan perbedaan etnis dan sikap yang

bersedia menerima serta merespon perbedaan dengan cara yang inklusif. Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat dicapai melalui dialog terbuka, pemahaman, dan respek terhadap keberagaman masyarakat.

Terdapat pula ancaman politik Identitas terhadap Demokrasi, beberapa diantaranya antara lain:

- a. Mengecilkan Identitas Lain: Politik identitas berpotensi mengurangi atau menghilangkan pengakuan terhadap identitas lain dalam masyarakat.
- b. Menutupi Perdebatan Program Kerja Berkualitas: Fokus pada politik identitas dapat mengaburkan perdebatan yang seharusnya berkisar pada program kerja berkualitas.
- c. Memecah Belah Masyarakat: Politik identitas cenderung lebih memecah belah daripada mempersatukan masyarakat.

Secara keseluruhan, politik identitas membawa dampak yang kompleks, dengan potensi untuk memperkuat atau merusak stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Penekanan pada kesadaran, inklusivitas, dan penyelesaian konflik menjadi kunci dalam mengelola dampak negatif politik identitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh beberapa kesimpulan yang antara lain:

- a. Politik identitas pada pemilihan kepala desa sesungguhnya sulit untuk dihindarkan, karena penduduk di desa merupakan kumpulan dari beberapa identitas termasuk identitas marga, identitas agama, identitas suku, identitas yang timbul dari sejarah dan lain sebagainya. Politik identitas karena dianggap sebagai salah satu alat untuk mendulang suara dan memiliki potensi menang yang cukup besar, maka politik identitas tersebut akan terus berlanjut. Politik identitas bisa saja tidak terjadi pada pemilihan kepala desa apa bila calon yang ada berasal dari identitas yang sama,
- b. Bentuk-bentuk dari politik identitas yang terjadi di desa cukup bervariasi, tergantung desa yang sedang melangsungkan pemilihan kepala desa, calon yang sedang berkompetisi, identitas calon kepala desa yang berkompetisi dan faktor-faktor lain yang menyebabkan politik identitas dimainkan. Namun dalam penelitian ini bentuk-bentuk politik identitas yang terjadi pada pemilihan kepala desa antara lain adalah identitas etnis, agama, ideologi, gender, perbedaan teritorial, perbedaan marga dan kepentingan lokal.
- c. Dampak dari politik identitas di desa antara lain :
 1. Polarisasi Sosial, Politik identitas dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat dan tantangan untuk mengembalikan persatuan sebagai bangsa. Masyarakat menjadi terbagi-bagi berdasarkan identitas mereka, mengakibatkan ketegangan dan ketidakharmonisan sosial.
 2. Perlakuan Tidak Setara, Tentunya politik identitas dapat membawa pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi dalam proses demokrasi.
 3. Psikologi Sosial Masyarakat: Politik identitas dapat memengaruhi psikologi sosial masyarakat, membuat mereka mudah tersinggung, emosional, dan rentan terprovokasi. Oleh karenanya Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap konflik dan sulit untuk menjaga keseimbangan emosional dalam berbagai situasi politik.
 4. Politik identitas dapat menciptakan perpecahan dan konflik di masyarakat, terutama jika didasarkan pada faktor etnis dan etnosentrisme, dengan kata lain merasa paling benar dan meremehkan orang lain.

Terdapat pula dampak positif dari politik identitas yaitu:

1. Identitas dapat menciptakan dinamika dalam perilaku politik lokal, dengan calon kepala desa berusaha mempengaruhi warga untuk mendukung mereka.
2. Kesadaran Antar etnis, kesadaran yang kuat akan perbedaan etnis dan sikap yang bersedia menerima serta merespon perbedaan dengan cara yang inklusif. Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat dicapai melalui dialog terbuka, pemahaman, dan respek terhadap keberagaman masyarakat.

Sebagai saran dalam tulisan ini, kepada calon kepala desa yang akan berkontestasi supaya berupaya untuk menghindari diri melakukan politik identitas sebagai alat untuk mendulang suara, karena akan menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi berupayalah untuk menunjukkan integritas, gagasan serta visi-misi yang logis dan dapat diterima oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.

Akmaluddin, A., & Ibrahim, H. (2022). Representasi Perilaku Budaya Politik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7236-7244.

Kalembang, E. (2019). Analisis Politik Identitas Dalam Pemilhan Kepala Desa. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 1(1), 23-26.

Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12-16.

Rahmawati, D. N. (2024). Penggunaan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2027 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu. *SELAMI IPS*, 17(1), 7-12.

Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat. *Mediation: Journal Of Law*, 31-37.

Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. *POLITIK*, 11(2)

Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 29-36.

Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117-124.